Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Vol. 4 No. 1, Juni 2022
ISSN: 2715-6273 (*online*) 2714-6510 (*print*)
https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/index

Sistem Pemerintahan Jepang Pada Muslim Jambi *Syu* Tahun 1942-1945

Mina Zahara[1], Agus Fiadi[2]
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Minazahara19@uinjambi.ac.id

Abstract*. This research is motivated by the author's observations on Japanese heritage in Jambi. Whether in the form of documents, objects and buildings. Meanwhile, the information regarding the Japanese occupation in Jambi is still insufficient and complete. Therefore the authors are interested in raising the title Reconstruction of the Dynamics of the Japanese Occupation Government in Jambi Syu. 1942-1945 AD. The research objective was to describe the state of Jambi prior to the Japanese occupation. Then describe the history of the Japanese entry in Jambi. Next, he describes the government system that was applied during the Japanese occupation in Jambi. This type of research is literature research using descriptive analytical methods with a historical approach using historical method work steps, the researcher will try to describe and tell what the author found in a thesis entitled Reconstruction of the Dynamics of Japanese Occupation Government in Jambi Syu. 1942-1945 AD. The results of this study indicate that before Japan conquered the Jambi residency, Japan first carried out propaganda in various aspects. Only then did Japan conquer. The government system used by Japan is different from the government system applied during the Dutch administration. the government system applied is a militaristic government sistem. This change has had a profound impact on the lives of the people of Jambi. Although using a different government system, the government structure used follows the old structure with changes in the pronunciation of each position into Japanese.*
Keywords: *Jambi, Occupation, Japan and Government Sistem*

Abstrak. Berdasarkan sumber-sumber yang penulis temukan baik berupa dokumen, benda dan bangunan peninggalan Jepang di Jambi membuat ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peralihan Pemerintahan Jepang pada masa Jambi *Syu* 1942-1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana kondisi Keresidenan Jambi sebelum kedatangan Jepang. Bagaimana sejarah masuknya Jepang ke Jambi, bagaimana sistem Pemerintahan Jepang di Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta pendekatan sejarah peneliti akan berusaha untuk menggambarkan dan menceritakan apa yang penulis temukan. Hasil penelitian ini menunjukkan, *Pertama* propaganda yang dilakukan oleh Jepang menjadi salah satu jalan mudahnya Jepang masuk ke Keresidenan Jambi. *Kedua* keberhasilan propaganda Jepang dilanjutkan dengan aksi penaklukan berbagai wilayah di Keresidenan Jambi. *Ketiga* Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang adalah sistem pemerintahan militeristik. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Jepang memiliki perbedaan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda. Walaupun menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda akan tetapi struktur pemerintahan

yang digunakan mengikuti struktur yang lama dengan perubahan penyebutan dalam setiap jabatan ke dalam bahasa Jepang.

Kata Kunci : Jambi, Pendudukan, Jepang dan Sistem Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Jepang telah lama memiliki ketertarikan terhadap wilayah-wilayah di Asia Tenggara untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah jajahannya. Ketertarikan Jepang dikarenakan Jepang melihat wilayah-wilayah di Asia Tenggara mayoritas memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya wilayah Indonesia yang memiliki sumber – sumber daya alam yang begitu banyak tersedia utamanya minyak tanah, timah, karet, dan lain-lain (Yoesoef, 2010). Faktor lainya karena adanya hubungan dengan ajaran *Shintoisme* tentang *Hokka-ichiu* yang dianut oleh Jepang, yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga manusia. Jepang yang merupakan negara yang telah mencapai tingkat kemajuan memiliki kewajiban untuk menyatukan bangsa-bangsa di dunia dan ikut serta memajukannya (Moedjanto, 66). Maka sebagai langkah awal untuk menaklukan wilayah Indonesia, Jepang melakukan propaganda-propaganda dalam berbagai aspek di Indonesia. Jepang melakukan propaganda dengan menempatkan distributor-distributornya atau agen-agennya ke pasar-pasar di wilayah Indonesia. Para distributor tersebut menjual barang-barang dengan harga yang murah dan melayani para pembelinya dengan penuh sopan santun. Propaganda ini ternyata sangat efektif. Hal ini terlihat pada saat kedatangan Jepang ke Indonesia, orang-orang pribumi sangat menyambut orang-orang Jepang tersebut utamanya orang-orang Jepang yang berprofesi sebagai pemilik toko. Toko tersebut tepatnya berada di Yogyakarta yang diberi nama toko Fuji.

Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernurnya.

Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya

ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi.

Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK)

Kedatangan pasukan Jepang ke Sumatera di permudah oleh kelompok-kelompok Islam yang sangat anti terhadap Belanda yang diorganisir dengan cukup rapi. Beberapa di antaranya kelompok-kelompok tersebut didirikan dengan bantuan dari pihak Jepang. Di Sumatera pasukan Jepang mengalami perlawanan sengit dari tentara-tentara Belanda. Pada tanggal 14 februari 1942, Jepang mengirimkan sebanyak 260 prajurit payung dari daerah Malaya yang diterjunkan di lapangan terbang utama di Palembang (Mulyono, 2018). Lebih dari 100 orang prajurit payung di terjunkan di tempat-tempat penyulingan minyak didekat daerah Palembang. Pasukan prajurit payung tersebut mendapatkan perlawanan dari tentara Belanda yang menembakan Meriam-meriam pada malam tanggal 15 februari 1942 jepang mengirimkan bantuan pasukan dari sebuah pasukan resimen infanteri di Muara Sungai Musi. Setelah peristiwa penyerangan di Pulau Bangka, (Zuhdi, 49) pada tanggal 16 Februari 1942 Palembang dan sekitarnya berhasil dikuasai oleh Jepang (Poesponegoro, 2)

Maka Tepat pada tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jenderal Ter Poorten, yang merupakan seorang Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda yang bernama Angkatan Perang Serikat di Indonesia, Mewakili pemerintahan Belanda serta tentara-tentara sekutu untuk menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura .(Ricklef, 2008:298) Maka dengan demikian berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di

Indonesia, dan dengan secara otomatis Indonesia memasuki suatu periode pemerintahan baru (Fadli & Kumalasari, 2019).

Dari Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Belanda yang pada saat itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar dengan didukung oleh kekuatan-kekuatan negara sekutunya, namun pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jepang, dengan berbagai upaya propaganda yang dilakukan Jepang. Dengan terjadinya perubahan pemegang pemerintahan dari Belanda ke Jepang maka berdampak pada perubahan kebijakan dan sistem pemerintahan yang dijalankan, yang sebelumnya Belanda menggunakan sistem pemerintahan sipil berubah menjadi sistem pemerintahan militer ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia. Maka seperti apa apakah proses masuknya jepang ke wilayah Jambi serta perubahan pada kebijakan dan sistem pemerintahan yang terjadi merupakan hal yang menarik perhatian dari peneliti. Walaupun karya tulis tentang Bagaimana Pendudukan Jepang di Indonesia dan di Sumatera memang sudah ada beberapa baik itu dalam bentuk artikel maupun hasil penelitian. Akan tetapi karya tulis yang membahas tentang bagaimana sejarah masuknya Jepang di Jambi, jalur-jalur mana saja yang dilalui dan bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan masih belum ada yang membahas secara komplek dan lebih rinci. Sedangkan sejarah tersebut menurut penulis sangat perlu untuk diketahui banyak orang khususnya masyarakat Jambi. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengangkat judul Rekonstruksi Peralihan Pemerintahan Pendudukan Jepang di Jambi *Syu* Tahun 1942-1945 Masehi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masuknya Jepang ke Keresidenan Jambi

Di Kota Jambi dan Sungai Penuh rakyat yang telah mempunyai radio yang mendengarkan kabar tentang apa yang telah dikatakan oleh Jepang mengenai tujuan dari perang Asia Timur Raya dalam siaran radionya kemudian menyebar-luaskannya kepada seluruh rakyat Jambi. Setelah berhasil melakukan propagandanya melalui saluran Radio. Jepang terus melancarkan propaganda-propagandanya yang lainnya. (Tim Peneliti Pencatatan Kebudayaan Daerah: 110-111)

Pada tahun 1920 orang-orang Jepang datang ke Jambi menyamar dengan berprofesi sebagai juru photo. Kemudian mereka tinggal menetap sementara dari desa ke desa terutama di desa- desa yang banyak penduduknya atau di desa berstatus sebagai Ibukota Marga. Di daerah perkotaan mereka membuka

rumah makan. Masakan yang dijual, dimasak dengan menggunakan resep-resep Indonesia dan yang menjualnya juga adalah orang Indonesia. Orang-orang Jepang tersebut hanya menyediakan modal saja. Sedangkan yang lainya berprofesi sebagai penjual kayu dan pedagang kelontong. (Nasruddin, 2018).

Pada Tahun 1930 barulah orang-orang Jepang di Jambi tersebut membuka Toko yang dikelola olehnya sendiri. Mereka membuka dua buah toko yang diberi nama *"Sakuma"* dan *"Ten Ma"* dan satu toko menjual barang-barang sembako dan toko lainya berjualan berbagai jenis obat-obatan (Anonim, 2014). Maka Toko-toko tersebut kemudian menjadi toko yang ramai pembelinya. Karena toko ini sangat lengkap dan menjual barang-barangnya dengan harga yang sangat murah dan mereka melayani semua pembelinya dengan sangat ramah dan sopan santun. Hal ini bertujuan untuk membuat rakyat Jambi mengira bahwa kedatangan Jepang nantinya akan membuat semua barang-barang akan menjadi lebih murah .

Dengan sopan santun yang ditunjukan Jepang akan senantiasa melayani semua rakyat dengan ramah, sopan dan santun. Selain itu orang-orang Jepang yang berprofesi sebagai juru photo dan pedagang memiliki maksud yang lain mereka membawa tugas penting untuk mempelajari *psychologi* masyarakat Jambi secara umumnya di daerah pedesaan dan melakukan propaganda dalam bidang ekonomi. Seperti pengelolaan minyak di Jambi yang sebelumnya dipegang NV NIAM, 1942-1945 dikelola Mustada Butai (Jepang). (Arman, 2020: 133)

Setelah semua persiapannya dirasa telah cukup matang. Maka Jepang dengan dipimpin oleh Kolonel Namora yang merupakan bagian dari Angkatan Darat Jepang melaksanakan misinya untuk merebut daerah Jambi dari pemerintah Belanda. Jepang memulainya dengan merebut daerah Padang dan Palembang terlebih dahulu. Pada tanggal 14 februari 1942 Jepang berhasil merebut daerah Palembang dari pemerintah Belanda (Tim KPEPKD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2014). Setelah berhasil merebut daerah Palembang Maka daerah yang berikutnya yang akan direbut dari pemerintah Belanda adalah Lubuk Linggau.

Dari Palembang Kolonel Namora dan pasukannya bergerak untuk melakukan penyerangan ke daerah Lubuk linggau. (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi, 1986:17) Terjadilah pertempuran yang cukup sengit antara Kolonel Namora dan anak buahnya melawan pemerintah Belanda. Namun Kolonel Namora dan pasukanya berhasil memenangkan pertempuran melawan tentara-tentara Belanda yang ada di Linggau. Akhirnya

pada tanggal 21 Februari 1942 Kolonel Namora dan pasukanya berhasil menguasai daerah Lubuk Linggau. (Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jambi, 1979)

Setelah berhasil menduduki daerah Lubuk Linggau, Kolonel Namora dan pasukannya bergerak ke Muara Rupit. Kolonel Namora dan Pasukanya hanya membutuhkan waktu sehari untuk berhasil menduduki wilayah Muara Rupit tepatnya pada tanggal 23 februari 1942 Jepang berhasil menguasai daerah Muara Rupit. (Tim Penyusun Monografi Daerah Jambi, 26) Setelah berhasil menguasai Muara Rupit pada tanggal 24 Februari 1942 Jepang meluruskan pergerakannya menuju Jambi melalui Sarolangun dan Rawas. Setelah terjadi peperangan sehari semalam. kemudian tepatnya pada tanggal 25 Februari 1942 kedua daerah tersebut berhasil dikuasai. (Musium Perjuangan Rakyat Jambi, 2015:11)

Setelah berhasil menduduki Sarolangun pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Namora semakin bersemangat untuk meneruskan serangannya ke wilayah Jambi secara lebih luas lagi. Pasukan Jepang tersebut melakukan pergerakan dengan sangat cepat. Setelah melakukan persiapan yang matang. Pasukan Jepang tersebut melanjutkan serangannya yang diarahkan menuju daerah Bangko dan Rantau Panjang. Pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Namora tersebut hanya membutuhkan waktu sehari semalam untuk berhasil menaklukan pasukan Belanda di Bangko dan Rantau Panjang. Tepatnya pada tanggal 26 Februari 1942 Jepang berhasil menaklukan daerah Bangko dan Rantau Panjang.(Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jambi, 1979) Maka dengan kemenangan tersebut serangan-serangan terhadap daerah-daerah di Keresidenan Jambi semakin gencar dilakukan oleh pasukan Jepang tersebut.

Setelah kekuatan pasukannya dirasa telah kembali Kolonel Namora memutuskan untuk melanjutkan serangnya. Selanjutnya pasukan Jepang tersebut melancarkan seranganya menuju daerah Muara Bungo. Akhirnya pada tanggal 28 Februari 1942 pasukan Jepang tersebut berhasil merebut wilayah Muara Bungo dari Pemerintah Belanda. Kemudian pasukan Jepang tersebut meneruskan kembali serangnya daerah yang menjadi target berikutnya adalah Muara Tebo. Pertempuran antara pasukan Jepang tersebut dengan pasukan Belanda terjadi selama dua hari dua malam. Tepatnya pada tanggal 2 Maret 1942 wilayah Muara Tebo berhasil dikuasai oleh Jepang. (Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jambi, 1979)

Di Muara Tebo Jepang menyusun kembali strategi untuk melakukan serangan berikutnya. Kemudian Jepang membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Kolonel Namora. Pasukan ini bertugas untuk melakukan penyerangan ke Pulau Musang. Sedangkan pasukan kedua dipimpin oleh Kapten Orita. Pasukan ini bertugas untuk melakukan penyerangan ke Kota Jambi. (Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jambi, 1979)

Setelah menyusun strategi dan melakukan persiapan yang matang. Seranganpun dilancarkan oleh kedua kelompok pasukan Jepang tersebut. penyerangan di Pulau Musang mendapatkan perlawan yang sangat sengit dari pasukan Belanda. Akhirnya dalam pertempuran itu Kolonel Namora Gugur. (Tim Peneliti Pencatatan Kebudayaan Daerah, 112) Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Orita dengan bersusah payah akhirnya berhasil menduduki daerah Kota Jambi. Tepatnya pada tanggal 04 Maret 1941 Kota Jambi berhasil dikuasai oleh Jepang. (Tim Penelitian Tinggalan Sejarah dan Kebudayaan, 2000).

Sedangkan untuk wilayah Kerinci pada saat itu belum berhasil dikuasai oleh Jepang. Untuk memaksimalkan serangan di kerinci maka Jepang memerintahkan pasukannya yang berada di daerah Padang untuk melakukan penyerangan ke Kerinci. Daerah kerinci sangat sulit untuk ditembus oleh Pasukan Jepang. Pasukan Jepang terus melakukan penyerangan ke Kerinci. Secara perlahan-lahan Jepang melakukan penaklukan di wilayah Kerinci. (Tim Penyusun Monografi Daerah Jambi, 1976) Jepang membutuhkan setidaknya selama 13 hari, tepatnya pada tanggal 17 maret 1942 Jepang akhirnya berhasil menduduki daerah Kerinci. (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi, 18) Maka Dengan berhasilnya Jepang menduduki daerah Kerinci maka Jambi secara langsung mengalami pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang.

Pada awal kedatangan Jepang Ke Jambi sangat mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Jambi saat itu. Rakyat merasa puas dan lega karena Belanda berhasil diusir dari Jambi. Bahkan rakyat Jambi diberikan kesempatan untuk bersama-sama tentara Jepang melakukan perampasan terhadap rumah orang-orang Belanda. Akan tetapi, kemudian harta rampasan yang telah dikumpulkan oleh rakyat Jambi diminta dikumpulkan di pinggir-pinggir jalan. hal itu diikuti oleh rakyat Jambi. ((Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jambi, 1979)Kedatangan Jepang telah membawa perubahan Sosial

dalam kehidupan Masyarakat baik cara berpikir maupun nilai-nilai masyarakat. (Yoesoef, 2010: 11-16).

Sistem Pemerintahan Jepang di Jambi

Setelah seluruh wilayah Jambi berhasil diduduki oleh Jepang dalam waktu yang singkat. (TIM KPEPKD, 2014:20) Kemudian pada tanggal 10 Maret 1942, dibuatlah susunan tata pemerintahan di Jambi oleh Jepang. Pada dasarnya susunan tata pemerintahan yang dibuat adalah mempertahankan susunan tata pemerintahan Belanda. Jepang hanya melakukan beberapa perubahan saja. Diantaranya perubahan pada nama atau istilah pemerintahan yang sebelumnya kemudian dirubah dalam nama atau istilah berbahasa Jepang. Sedangkan untuk sistem pemerintahan yang digunakan. Jepang menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda dengan Belanda. Belanda menggunakan sistem pemerintahan sipil yang berorientasi kepada kepentingan di bidang perekonomian, sedangkan Jepang menggunakan sistem pemerintahan militeristik yang berorientasi pada kepentingan dalam bidang militer.

Mengenai Struktur Pemerintahan yang dipakai pada masa Jepang memiliki dua versi struktur pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

a. Struktur Pemerintahan Jepang Dengan menggunakan *Bun Syuco*

Struktur Pemerintahan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jambi Dengan Jabatan *Bun Syuco*

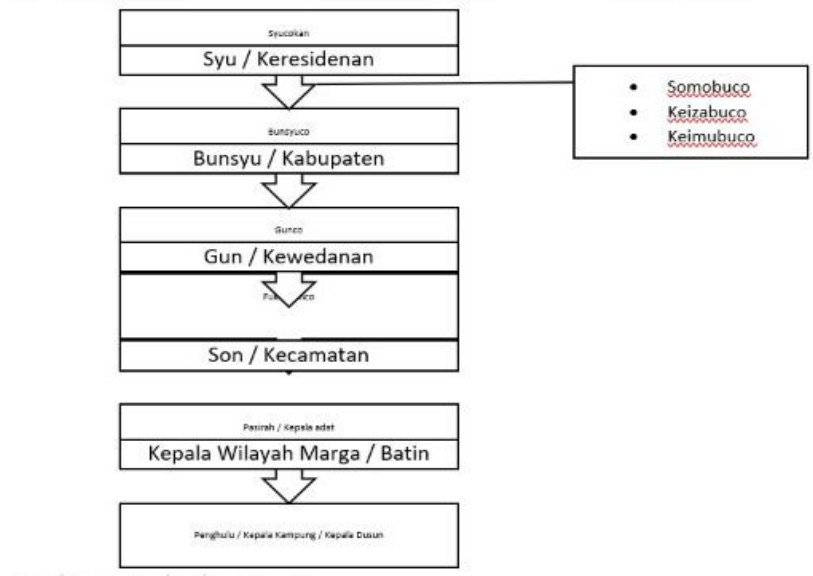

Sumber: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi,* Halaman 19.

Istilah Keresidenan digantikan dengan kata Syu, Sedangkan Residen di ganti dengan kata Syucokan. (Tim KPEPKD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2014) Afdeling yang dipimpin oleh kontrolir digantikan istilahnya dengan bun Syu dan pimpin oleh seorang Bun Syuco. Sedangkan istilah Onderafdeling yang dipimpin oleh demang, digantikan dengan istilah gun dan dipimpin oleh seseorang yang disebut Gunco. Sedangkan istilah onderdistrik yang dipimpin oleh seorang asisten demang digantikan dengan istilah fuku gunco.

Dalam menjalankan tugasnya *Syucokan* yang berada di daerah Jambi dibantu oleh :

1) *Somobuco*, Kepala Pemerintahan Umum
2) *Keizabuco*, Kepala Perekonomian
3) *Keimubuco*, Kepala Kepolisian.

Sementara itu, pasukan perang Jepang telah berhasil menguasai seluruh pulau Sumatera yang dipusatkan di Bukit Tinggi. Oleh sebab itu Panglima Angkatan Perang Pasukan Jepang di Sumatera juga merangkap sebagai Kepala Pemerintahan Sipil untuk seluruh pulau sumatera. Maka kemudian ibukota Sumatera yang semula berpusat di Medan dipindahkan ke Bukit Tinggi.

Dalam melakukan pembagian di wilayah Jambi, Jepang berpedoman pada pembagian wilayah pada masa pemerintahan Belanda. Oleh sebab itu makan daerah Kerinci masih tetap masuk ke dalam Sumatera Barat. Maka Jambi *Syu* terbagi atas tujuh bunSyu yaitu :

1) *Bun Syu* Jambi (Jambi)
2) *Bun Syu* Tembesi (Muara Tembesi)
3) *Bun Syu* Tungkal (Kuala Tungkal)
4) *Bun Syu* Tebo (Muara Tebo)
5) *Bun Syu* Bungo (Muara Bungo)
6) *Bun Syu* Bangko (Bangko)
7) *Bun Syu* Sarolangun (Sarolangun)

b. Struktur Pemerintahan Jepang Tanpa menggunakan *Bun Syuco*

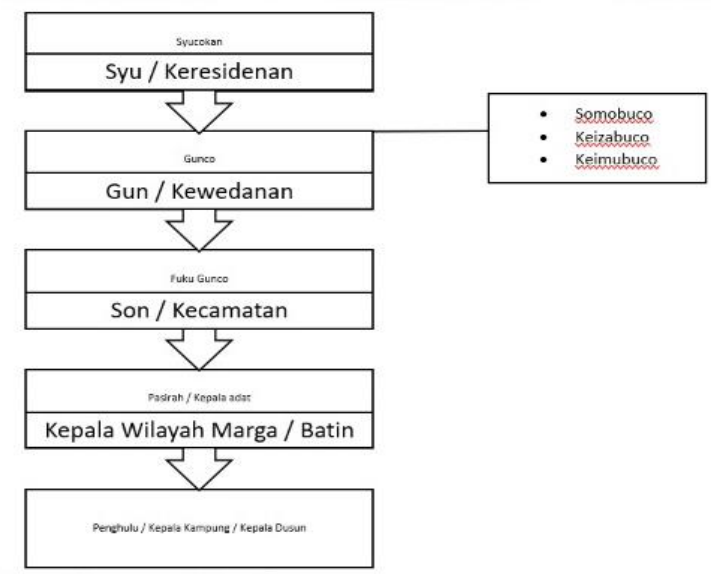

Sumber: Kerangka Acuan Penyusunan Sejarah dan Pembentukan Museum Departemen Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Halaman 37.

Struktur pemerintahan tanpa *Bun Syuco* memiliki penyebutan yang sama seperti struktur pemerintahan dengan menggunakan *Bun Syuco*. Perbedaan hanya pada Bun *Syuco*, dalam buku Kerangka Acuan Penyusunan Sejarah dan Pembentukan Museum Departemen Dalam Negeri dan buku Napak Tilas Provinsi Jambi Karya usman Meng. Istilah *Bun Syuco* atau kontolir di hilangkan, (Meng, 2006:27) alasanya karena pada pemerintahan Jepang tidak mengenal daerah Kabupaten. Sehingga Pemerintahan Jambi pada masa Jepang memiliki struktur menjadi sebagai berikut:

Perbedaan pada struktur pemerintahan juga menyebabkan perubahan pada penyebutan pembagian wilayah di Jambi *Syu*. Maka Jambi *Syu* terbagi atas tujuh *Gun* yaitu : (Ali, 35)

1) *Gun* Jambi (Jambi)
2) *Gun* Tembesi (Muara Tembesi)
3) *Gun* Tungkal (Kuala Tungkal)
4) *Gun* Tebo (Muara Tebo)
5) *Gun* Bungo (Muara Bungo)
6) *Gun* Bangko (Bangko)
7) *Gun* Sarolangun (Sarolangun)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wilayah Jambi *Syu* terdiri atas tujuh *bun Syu*. Jika dibandingkan dengan susunan pembagian wilayah Jambi sekarang maka wilayah *bun Syu* Bungo dan Tebo memiliki luas yang sama dengan wilayah kabupaten Tebo sekarang. Sedangkan luas wilayah *bun Syu* Tungkal sama dengan luas wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekarang. Kemudian luas wilayah *bun Syu* Tembesi sama dengan luas wilayah kabupaten Batanghari sekarang. Selanjutnya luas wilayah *bun Syu* Bangko dan Sarolangun sama dengan luas wilayah Kabupaten Sarolangun-Bangko. Sedangkan *bun Syu* Jambi sama dengan luas wilayah kota Jambi. Sedangkan kerinci pada masa pemerintahan Jepang masuk ke dalam wilayah Sumatera Barat *Syu*.

Batas-batas wilayah administrasi Jambi *Syu* pada masa pemerintahan Jepang adalah sebagai berikut :

a. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Riau *Syu.*
b. Di sebelah barat berbatasan langsung dengan *bun Syu* Kerinci dan Sumatera Barat *Syu.*
c. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Berhala.
d. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Palembang *Syu* dan Bengkulu *Syu.* (Hermanto Harun, 2013: 93)

Adapun orang-orang Jepang yang pernah memegang jabatan di pemerintahan Jepang di wilayah Jambi *Syu* adalah sebagai berikut :

a. *Syucokan* Jambi *Syu* dipegang oleh Kapten Orita yang kemudian digantikan oleh Skitojo.
b. *Somoboco* Jambi *Syu* dipegang oleh Syomi.

Sedangkan orang-orang pribumi Jambi yang pernah memegang jabatan dalam pemerintahan Jepang di wilayah Jambi *Syu* adalah sebagai berikut:

a. St. Sulaiman menjabat sebagai *Gunco* Sarolangun.
b. R. Supirman menjabat sebagai *Gunco* Bangko.
c. Kiagus M. Amin menjabat sebagai *Gunco* Bungo.
d. R. Syahabuddin Menjabat sebagai *Gunco* Tebo.
e. Zainul Bahri St. Menjabat sebagai *Gunco* Tembesi.
f. M. Bahsan menjabat sebagai *Gunco* Tungkal.
g. Sutan Parendangan menjabat sebagai *Gunco* Jambi.

Kemudian orang-orang pribumi Jambi juga pernah menjabat sebagai pimpinan dalam Kepolisian pada masa pemerintahan Jepang di Jambi, adalah sebagai berikut :

a. Teuku Muhammad Isya menjabat sebagai Kepala polisi Jambi *Syu.*
b. A. Manaf menjabat sebagai pembantu Kepala Polisi Jambi *Syu.*
c. Latif Menjabat sebagai pembantu Kepala Polisi Jambi *Syu.*
d. Jahari menjabat sebagai Kepala Polisi Sarolangun.
e. R. Syarif menjabat sebagai Kepala Polisi Bungo.
f. M. Kuris menjabat sebagai Kepala Polisi Tebo.
g. Darwis menjabat sebagai kepala polisi Tembesi.

Berdasarkan nama-nama yang tersebut di atas, ada sebagian orang-orang yang pernah menjabat pada pemerintahan Jambi *Syu* adalah bukan dari kalangan ulama, akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ulama mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan Jambi *Syu.*

Sejak awal abad 19 Islam sudah mulai berkembang dengan pesat di Jambi dan masyarakat sudah hidup berlandaskan ajaran agama Islam (Apdelmi, 2008: 20) akan tetapi kehadiran Jepang di Jambi ternyata tidak hanya merubah sistem pemerintahan di Jambi akan tetapi juga berpengaruh terhadap dalam aspek kehidupan lainnya, seperti gaya busana Perempuan di Jambi, dibawah kepemimpinan Jepang rakyat mengalami kemiskinan hingga berpengaruh terhadap cara berpakaian, pada masa itu gadis-gadis di Jambi berhenti menenun, karena apabila terdengar dentang-denting alat tenun menandakan adanya anak gadis di rumah tersebut, maka tentara Jepang akan merekrutnya menjadi "*Geisha"* atau Wanita penghibur yang mengikuti tantara. (Emilia, 2021: 47). Meski tampak berbeda dengan pemerintahan Belanda, dimana Belanda sangat menampakkan anti Islam namun tujuan dari pemerintahan Jepang di Jambi adalah sama yakni ingin melanggengkan kekuasaannya di Negeri ini. (Halim, 2015: 50)

PENUTUP

Sebelum Jepang melakukan pendudukan di Jambi Jepang terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap pemerintahan Belanda. Jepang melakukan propaganda dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik dan bidang sosial. Jepang menjanjikan ekonomi yang lebih baik dan berjanji akan memajukan Jambi Jika Jepang telah berhasil merebut wilayah Jambi dari pemerintah Belanda. Jepang juga mengirimkan mata-matanya untuk

mempelajari wilayah Keresidenan Jambi dari berbagai aspek dan menaklukkan wilayah ini.

Struktur Pemerintahan yang digunakan oleh Jepang pada masa pendudukannya pada dasarnya mengikuti struktur pemerintahan Belanda. Akan tetapi Jepang melakukan pergantian istilah atau penyebutanya saja ke dalam bahasa Jepang. Namun sistem pemerintahan yang dipakai berbeda dengan Belanda. Jepang menggunakan sistem pemerintahan Militeristik yang memiliki orientasi kepentingan pada bidang militer. Sedang Belanda dengan pemerintahan sipil yang berorientasi pada kepentingan di bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2014). *Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pesako Betuah*. Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Jamb.

Apdelmi. (2008). Islam dan Sejarahnya Pada Masyarakat Jambi Sebrang. *Tsaqofah Dan Tarikh*, *3*(1).

Arman, D. (2020). Eksploitasi Minyak di Jambi Tahun 1922-1948. *Pangadereng*, *6*(1).

Emilia, M. (2021). Sejarah Gaya Berbusana Perempuan Kota Jambi Tahun 1900-1970. *Siginjai, Jurnal Sejarah*, *1*(2).

Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, *13*(2), 189. https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p189-205

Halim, A. (2015). Pluralisme dan Dialog Antar Agama. *Tajdid*, *XIV*(1).

Hermanto Harun, I. S. (2013). Dinamika Model Pemerintahan Dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo. *Kontekstualita*, *28*(1).

Mulyono, S. (2018). *Kesadaran Nasional dari kolonialisme sampai kemerdekaan jilid II*. LKIS.

Nasruddin, M. (2018). *Jambi Dalam Sejarah Nusantara 692-1949 M*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi.

Tim KPEPKD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (2014). *Perjuangan Rakyat Tanjung Jabung 1942-1949*. Kantor Pengolahan Data Elektronik.

Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jambi. (1979). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Tim Penelitian Tinggalan Sejarah dan Kebudayaan. (2000). *Sejarah Perjuangan Rakyat Jambi Terhadap Penjajahan Jepang*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Penyusun Monografi Daerah Jambi. (1976). *Monografi Daerah Jambi*. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Yoesoef, M. (2010). Drama di Masa Pendudujan Jepang (1942-1945) Sebuah Catatan Tentang manusia Indonesia Zaman Perang. *Jurnal Makara Sosil Humaniora*, *14*(1).